Nusantara Journal of Multidisciplinary Science
Vol. 4, No. 4, November 2026
Hal 516-521
E-ISSN : 3024-8752
P-ISSN : 3024-8744
Site : https://jurnal.intekom.id/index.php/njms

Persepsi Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Lingkungan FISIPOL Universitas Negeri Surabaya

Rivani Anggraini Putri*, Ratna Nur Wahyuni, Aizzatul Azmil Arifin, Mutia Syafitri, Meirinawati, Indah Prabawati
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received November 3, 2026
Revised November 4, 2026
Accepted November 4, 2026

Kata Kunci:

Persepsi Mahasiswa,
Implementasi Kebijakan,
Kawasan Tanpa Rokok,
Edward III

Keywords:

Student Perception,
Policy Implementation,
Smoke-Free Area,
Edward III

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara terhadap implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Negeri Surabaya berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa mengetahui adanya larangan merokok dan tanda larangan telah tersedia, tetapi implementasi KTR belum optimal. Sosialisasi langsung masih terbatas, penempatan tanda larangan belum merata, pengawasan dan teguran jarang terlihat, serta pihak penanggung jawab dan prosedur penanganan pelanggaran belum diketahui mahasiswa. Penelitian ini menyarankan sosialisasi yang terjadwal dan berkelanjutan, penambahan serta penataan tanda larangan dan penanda batas area, pengaktifan petugas pengawas, serta penetapan dan pengumuman prosedur penanganan pelanggaran secara terbuka.

ABSTRACT

This study aims to describe the perceptions of undergraduate Public Administration students regarding the implementation of the Smoke-Free Area (KTR) policy at the Faculty of Social Sciences and Political Science (FISIPOL), Universitas Negeri Surabaya, based on the four variables of George C. Edward III's policy implementation model: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study employs a qualitative approach with a descriptive research design, in which data were collected through interviews, observation, and documentation, and then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results show that students are aware of the smoking ban and that prohibition signs are available, but the implementation of the policy is not yet optimal. Direct socialization is limited, the placement of signs is uneven, supervision and warnings are rarely seen, and students do not know the responsible parties or the procedures for handling violations. This study recommends scheduled and continuous socialization, additional and better-placed signs and area boundary markers, activation of supervising officers, and open announcement of violation-handling procedures.

This is an open access article under the CC BY license

Corresponding Author:

Rivani Anggraini Putri
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
Surabaya, Indonesia
Email : rivani.23029@mhs.unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek penting yang perlu dijaga melalui lingkungan yang sehat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi yang digunakan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan untuk kegiatan akademik maupun nonakademik. Salah satu persoalan kesehatan yang masih menjadi perhatian adalah konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya berusia 10–18 tahun [1]. Hasil *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) 2021 mencatat penambahan perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang dalam satu dekade, dari 60,3 juta pada 2011 menjadi 69,1 juta pada 2021 [2]. Selain itu, *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) 2019 mencatat bahwa 40,6% pelajar Indonesia usia 13–15 tahun pernah menggunakan produk tembakau, dengan 19,2% di antaranya merupakan perokok aktif [3]. Kelompok usia remaja akhir hingga dewasa muda tersebut merupakan populasi dominan di perguruan tinggi.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tujuan penetapan KTR, larangan, kewajiban pimpinan kawasan, pembinaan dan pengawasan, hingga sanksi [4]. Institusi pendidikan tinggi termasuk kawasan yang wajib menerapkan kebijakan ini. Namun, keberadaan regulasi tidak selalu diikuti pemahaman, kepatuhan, dan perilaku yang sesuai dari seluruh warga kampus. Penelitian di Universitas Negeri Surabaya menemukan bahwa pengetahuan hukum mahasiswa mengenai KTR tergolong tinggi, tetapi pemahaman, sikap, dan perilaku hukumnya masih rendah, dengan kendala berupa sosialisasi yang belum optimal [5]. Di lingkungan UNESA, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) meluncurkan program Kawasan Tanpa Rokok pada November 2023 [6], tetapi kondisi tersebut belum menggambarkan bagaimana mahasiswa di fakultas lain, termasuk FISIPOL, memahami dan mengalami penerapan kebijakan yang sama.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan KTR di perguruan tinggi masih menghadapi kendala. Penelitian di UPN Veteran Jawa Timur menemukan kendala pada sosialisasi, pengawasan, kepatuhan warga kampus, dan penegakan aturan [7], sedangkan kajian pada perguruan tinggi negeri di Surabaya menunjukkan bahwa keberadaan peraturan daerah belum menjamin pelaksanaan kebijakan yang optimal [8]. Penelitian di FISIP Universitas Padjajaran dengan teori Edward III menegaskan bahwa aturan saja belum cukup tanpa dukungan sosialisasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan pengawasan [9]. Temuan serupa dilaporkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta [10] dan Universitas Negeri Yogyakarta [11]. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut sebagian besar diarahkan pada proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta pengawasan dari perspektif pelaksana atau institusi. Persepsi mahasiswa sebagai pengguna langsung lingkungan kampus pada level fakultas, khususnya di FISIPOL UNESA, belum banyak dikaji.

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang memandang implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi [12], sebagai salah satu pendekatan operasional di samping model Van Meter dan Van Horn [13]. Model ini banyak digunakan karena menyediakan faktor yang dapat dipakai menganalisis pelaksanaan kebijakan secara operasional [14]. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

persepsi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara terhadap implementasi Kebijakan KTR di lingkungan FISIPOL UNESA. Penelitian ini tidak dimaksudkan menilai kondisi internal pelaksana kebijakan yang tidak diketahui mahasiswa, melainkan menggambarkan penerapan KTR sebagaimana mereka ketahui, lihat, dan alami.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami pengalaman dan pandangan mahasiswa mengenai penerapan KTR, tanpa menguji hubungan antarvariabel secara statistik [15]. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Negeri Surabaya, Jalan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, dengan fokus pada mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Penelitian berlangsung kurang lebih satu bulan, meliputi persiapan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan.

Fokus penelitian dianalisis berdasarkan empat variabel Edward III, yaitu komunikasi (penyampaian informasi dan sosialisasi KTR), sumber daya (sarana, prasarana, dan pengawasan), disposisi (sikap dan komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi (kejelasan aturan, tanggung jawab, dan prosedur). Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai penerapan KTR di fakultas. Data primer diperoleh melalui wawancara berpedoman pada panduan wawancara dan observasi kondisi lingkungan fakultas, seperti keberadaan tanda larangan merokok. Data sekunder berupa peraturan terkait KTR, SOP yang tersedia, dokumentasi sosialisasi, dan penelitian terdahulu.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi [16]. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta *member checking* [17].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan berdasarkan empat variabel Edward III. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNESA menjadi tempat berlangsungnya aktivitas akademik mahasiswa, pelayanan administrasi, dan kegiatan organisasi, sehingga penerapan KTR berkaitan dengan kenyamanan dan kesehatan seluruh pengguna fasilitas kampus. Ringkasan temuan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Persepsi Mahasiswa terhadap Implementasi KTR

Aspek	Temuan utama	Kondisi
Komunikasi	Larangan diketahui dari tanda dan lingkungan sekitar; sosialisasi langsung terbatas; batas area, tujuan, dan ketentuan belum dipahami.	Belum optimal
Sumber daya	Tanda larangan tersedia tetapi belum merata dan strategis; pengawasan dan teguran jarang terlihat.	Fasilitas ada, penempatan dan pengawasan belum optimal
Disposisi	Fakultas dinilai perlu mendukung KTR; tindakan nyata dan konsistensi belum terlihat; kepatuhan mahasiswa beragam.	Komitmen belum terlihat konsisten
Struktur birokrasi	Aturan tertulis, penanggung jawab, prosedur, dan konsekuensi pelanggaran belum diketahui rinci.	Perlu diperjelas dan diumumkan

3.1 Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan secara jelas dan konsisten kepada kelompok sasaran agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan [12]. Pada indikator transmisi, mahasiswa telah mengetahui adanya larangan merokok di lingkungan fakultas, tetapi pengetahuan tersebut diperoleh dari tanda larangan dan informasi lingkungan sekitar, bukan dari sosialisasi resmi. Salah satu informan menyatakan:

"Saya mengetahui kebijakan tersebut lebih karena adanya tanda atau larangan merokok yang pernah saya lihat di lingkungan kampus serta informasi dari lingkungan sekitar, bukan karena pernah mendapatkan sosialisasi secara khusus."

Pada indikator kejelasan, informasi larangan dinilai cukup terlihat, tetapi mahasiswa belum memahami batas wilayah KTR dan ketentuan yang berlaku di dalamnya. Pada indikator konsistensi, penyampaian informasi masih bertumpu pada media visual dan belum berlangsung berkelanjutan melalui berbagai media. Dengan demikian, komunikasi baru menyampaikan pesan larangan, belum tujuan, ruang lingkup, dan mekanisme pelaksanaan KTR. Temuan ini sejalan dengan penelitian di UNESA dan UPN Veteran Jawa Timur yang menempatkan sosialisasi yang belum optimal sebagai kendala utama [5], [7]. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan belum otomatis menghasilkan pemahaman yang sama pada kelompok sasaran.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya meliputi staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan [19]. Fasilitas pendukung KTR di FISIPOL UNESA telah tersedia dalam bentuk beberapa tanda atau papan larangan merokok, tetapi mahasiswa menilai tanda tersebut belum merata dan belum selalu berada pada titik yang strategis serta sering dilalui. Informan juga mengusulkan penambahan papan informasi dan penanda batas area KTR. Dari sisi sumber daya manusia, informan menyatakan:

"Keberadaan papan larangan saja belum cukup apabila tidak disertai pengawasan secara rutin. Perlu adanya petugas yang melakukan pemantauan dan memberikan teguran apabila ditemukan pelanggaran."

Mahasiswa belum sering melihat petugas melakukan pemantauan maupun memberikan teguran terbuka, sehingga pengawasan yang terlihat belum berjalan rutin. Kondisi ini perlu dicermati karena Peraturan Rektor UNESA Nomor 31 Tahun 2023 mewajibkan pimpinan unit kerja, termasuk fakultas, memasang penandaan KTR yang mudah terlihat dan membentuk Satuan Tugas Pengawas yang berwenang melakukan pemantauan, evaluasi, dan penindakan [18]. Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang menunjukkan bahwa ketersediaan tanda larangan dan penegakan aturan memengaruhi implementasi kebijakan kampus bebas asap rokok [10]. Dengan demikian, penerapan KTR membutuhkan fasilitas yang lebih memadai dan pengawasan rutin, dan tidak cukup berhenti pada pemasangan tanda larangan.

3.3 Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan [20]. Mahasiswa memandang bahwa pihak fakultas perlu mendukung KTR karena kebijakan tersebut bertujuan menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan nyaman, tetapi dukungan itu perlu terlihat melalui tindakan nyata seperti pengawasan dan teguran. Informan menyampaikan:

"Suatu kebijakan tidak cukup hanya dengan membuat aturan dan memasang tanda larangan, tetapi juga harus disertai pengawasan dan tindakan yang jelas apabila terjadi pelanggaran."

Mahasiswa belum sering melihat teguran langsung kepada pihak yang merokok di area terlarang. Kondisi ini tidak berarti bahwa fakultas tidak berkomitmen, melainkan bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya terlihat dari tindakan pelaksanaan yang dapat diamati mahasiswa. Hal ini penting karena mahasiswa menilai keseriusan kebijakan dari kondisi nyata sehari-hari. Tingkat kepatuhan mahasiswa

juga beragam: sebagian telah memahami dan mematuhi larangan, sedangkan sebagian lainnya kurang memperhatikan aturan, dan perbedaan tersebut berkaitan dengan kesadaran individu serta intensitas sosialisasi dan pengawasan. Pola ini konsisten dengan temuan di FISIP UNPAD bahwa regulasi belum cukup tanpa komitmen pelaksana dan mekanisme pengawasan [9].

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, prosedur, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan [21]. Mahasiswa mengetahui adanya larangan merokok di area tertentu, tetapi belum mengetahui secara rinci aturan tertulis, dasar hukum, dan ketentuan teknis penerapan KTR di FISIPOL UNESA. Informan menyatakan:

"Saya belum mengetahui secara pasti tindakan atau prosedur yang dilakukan pihak fakultas apabila terdapat mahasiswa yang melanggar larangan merokok."

Batas area larangan, pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan, serta konsekuensi pelanggaran belum dipahami jelas oleh mahasiswa. Apabila penanggung jawab tidak diketahui, mahasiswa kesulitan memahami kepada siapa pelanggaran dilaporkan dan bagaimana pengawasan dilakukan. Kondisi ini perlu dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Rektor yang telah mengatur sanksi bertingkat, dimulai dari teguran lisan tercatat oleh Satgas, serta pengawasan berjenjang di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan [18]. Hambatan pada aspek komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi dan SOP juga ditemukan pada penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta [11], dan belum optimalnya regulasi internal serta pengawasan ditemukan pada perguruan tinggi negeri di Surabaya [8]. Dengan demikian, pembagian tanggung jawab dan prosedur penanganan pelanggaran perlu diperjelas dan diumumkan secara terbuka kepada mahasiswa.

4. KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan KTR di lingkungan FISIPOL UNESA menurut persepsi mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara telah berjalan pada tahap awal, tetapi belum optimal. Pada aspek komunikasi, mahasiswa mengetahui larangan merokok terutama dari tanda larangan, sedangkan sosialisasi langsung terbatas dan batas area serta ketentuan KTR belum dipahami. Pada aspek sumber daya, tanda larangan tersedia tetapi penempatannya belum merata, dan pengawasan serta teguran jarang terlihat. Pada aspek disposisi, dukungan fakultas dinilai perlu diwujudkan dalam tindakan nyata yang konsisten, dan kepatuhan mahasiswa masih beragam. Pada aspek struktur birokrasi, aturan tertulis, penanggung jawab, prosedur, dan konsekuensi pelanggaran belum diketahui mahasiswa secara rinci. Kesimpulan ini menggambarkan persepsi mahasiswa berdasarkan apa yang mereka ketahui, lihat, dan alami, dan tidak dimaksudkan sebagai penilaian terhadap kondisi internal pelaksana kebijakan.

Berdasarkan simpulan tersebut, FISIPOL UNESA disarankan menyelenggarakan sosialisasi langsung yang terjadwal dan berkelanjutan, menambah dan menata tanda larangan serta penanda batas area KTR, membentuk atau mengaktifkan petugas atau Satgas pengawas dengan pemantauan rutin, melakukan teguran secara bertahap dan konsisten, serta menetapkan dan mengumumkan penanggung jawab dan SOP penanganan pelanggaran. Pihak universitas disarankan memantau pelaksanaan Peraturan Rektor Nomor 31 Tahun 2023 di tingkat fakultas, dan mahasiswa disarankan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan pelaksana kebijakan, memperluas jumlah dan ragam informan, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk mengukur kepatuhan dan hubungan antarvariabel.

REFERENSI

[1] Kementerian Kesehatan RI, "Perokok aktif di Indonesia tembus 70 juta orang, mayoritas anak muda," 2024.

[2] Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes RI, "Global Adult Tobacco Survey (GATS) Indonesia 2021," Jakarta, 2022.

[3] World Health Organization, "Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2019," 2020.

[4] Pemerintah Kota Surabaya, "Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok," 2019.

[5] Setyawan, "Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Aturan tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kampus Universitas Negeri Surabaya)," 2018.

[6] Universitas Negeri Surabaya, "Wujudkan lingkungan sehat, FIKK launching Kawasan Bebas Rokok," 2023.

[7] Annisa, Salmi, Prakosa, and Hardjati, "Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Menurut Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 (Studi di UPN Veteran Jawa Timur)," 2025.

[8] A. F. Rohman and A. W. Kartika, "Implementasi pengawasan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi perguruan tinggi negeri di Surabaya)," *Res Judicata*, vol. 9, no. 1, 2024.

[9] Mardiana *et al.*, "Faktor Pendorong dan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Smoking Area di FISIP UNPAD," 2025.

[10] Waliyanti and Sandika, "The Factors That Influence the Implementation of Smoke Free Campus Policy in University of Muhammadiyah Yogyakarta," 2018.

[11] Prasetyo and Rahayu, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Yogyakarta," 2016.

[12] G. C. Edward III, *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

[13] D. S. Van Meter and C. E. Van Horn, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework," *Administration & Society*, vol. 6, no. 4, pp. 445–488, 1975, doi: 10.1177/009539977500600404.

[14] M. Sitorus, "Pengaruh Communication, Resources, Disposition, dan Bureaucratic Structure Terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan (Studi Kasus Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Tobasamosir)," *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 4, no. 1, 2019, doi: 10.31113/jia.v4i1.412.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

[16] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed. Sage Publications, 1994.

[17] N. Carter, D. Bryant-Lukosius, A. DiCenso, J. Blythe, and A. J. Neville, "The use of triangulation in qualitative research," *Oncology Nursing Forum*, vol. 41, no. 5, pp. 545–547, 2014, doi: 10.1188/14.ONF.545-547.

[18] Universitas Negeri Surabaya, "Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya," 2023.

[19] S. Makmur, "Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan," *Lentera*, vol. 1, no. 3, pp. 172–176, 2023.

[20] P. Z. Sibarani, "Implementasi Kebijakan Pedoman Tata Naskah Dinas Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Palu," vol. 6, no. 1, 2026.

[21] Kristian, "Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kutai Barat No. 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kampung Linggang Mencelew, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat," *Jurnal Administrasi Reform*, vol. 1, no. 1, pp. 103–116, 2013.